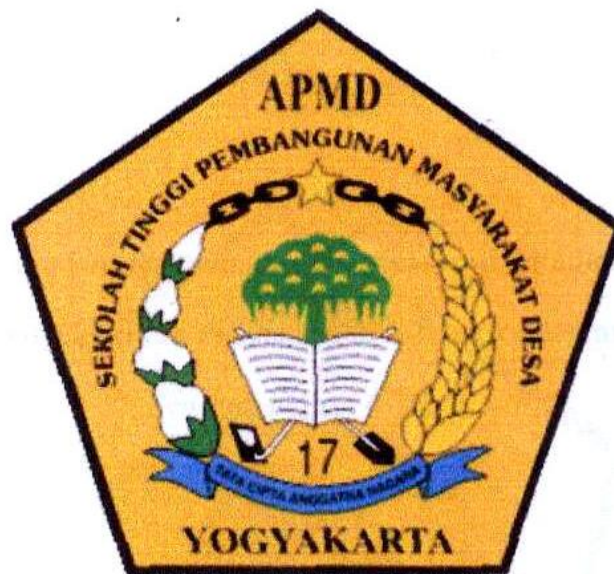


STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI

Di Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY

SKRIPSI



Di Susun Oleh :

Thopilus Aisnak

N.I.M : 11520118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "STPMD"

YOGYAKARTA

2018



STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI

*(Studi Deskriptif Kualitatif, Di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik
Guna Menyelesaikan Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jenjang Strata (S-1)**



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPM “APMD”

YOGYAKARTA





HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DIDEPAN TIM PENGUJI PROGRAM
STUDI ILMU PEMERINTAHAN PADA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA STPMD "APMD" YOGYAKARTA

Pada hari : Kamis
Tanggal : 5 April 2018
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Ruang M. Soetopo "STPMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tandatangan
1. <u>UTAMI SULISTIANA, S.P., M.P</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. JAKA TRIWIDARYANTA, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. SUMARJONO, M.Si</u> Penguji Samping II	



JENJANG PROGRAM STRATA-1
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD"
YOGYAKARTA

2018

HALAMAN MOTTO

Kata pkh: “segala sesuatu itu indah pada waktunya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratapi, ada waktu untuk menari” (pkh 3 : 4, 11)

Orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya (Mzm 126 : 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan pertolongan-Nya dalam hidupku, sehingga perjalanan panjang yang penuh suka maupun duka dalam menempuh studi hingga akhir pada penulisan skripsi ini telah saya selesaikan, dengan ketulusan hati serta kebanggaanku.

Hasil karya ini saya persembahkan kepada:

- 1) Kedua orang tua saya yakni Ayah tercinta Yunus Aisnak dan Ibunda tercinta Sopice Fatem (almarhumah), terima kasih karena telah menghadirkan saya di dunia ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk ibunda karena belum merasakan balas budi dari anakmu ini.*
- 2) Ibunda tercinta Marice Sedik yang sebagaimana membesarkan saya dari usia 5 tahun dan memposisikan saya sebagai anak kandungnya, terima kasih atas kesetiaan dan kasih sayang dan bimbingan yang ibunda limpahkan kepada saya dari usia anak-anak hingga remaja ini.*
- 3) Omku tercinta Yance Fatem, SPG dan keluarganya, terima kasih om atas didikanmu seorang guru pada bangku SD dan kasih sayang selama ini kepada saya, tiada kata yang pantas dari anakmu ini untuk sampaikan kepada Om tercinta dan keluarga, hanya anak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikannya, sehingga anak bisa menginjak pada jenjang seperti sekarang ini.*
- 4) Omku tercinta Timotius Fatem dan keluarganya, terima kasih atas dukungan Doa serta rasa kasih sayang selama ini kepada saya, tiada kata yang pantas dari anakmu ini untuk sampaikan kepada Om tercinta dan keluarga, hanya anak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan buat saya baik, biaya maupu nasehat yang baik dan berharga dari Om, sehingga bisa anak menyelesaikan skripsi ini.*
- 5) Kakaku tercinta Ferry Fatem SE, MM dan keluarganya, kakak yang saya anggap sebagai motivator bagi saya, tiada kata yang*

- pantas dari adikmu ini untuk disampaikan kepada kakak tercinta dan keluarga, hanya adik ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak atas pengorbanan kakak buat saya baik, biaya maupun nasehat yang baik dan berharga dari kakak, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
- 6) *Kakaku tercinta Balandina Fatem, S.Kep dan keluarganya, kakak yang saya anggap sebagai donatur utama dalam perkuliahan saya, terima kasih banyak buat kakak dan keluarga atas perhatian dan kasih sayangmu kepada saya baik berupa tenaga, waktu serta biaya yang selalu kakak dan keluarga berikan untuk adik dari awal perkuliahan sampai akhir ini.*
 - 7) *Kekasihku Yosina Sorry, S.Pd, terima kasih atas dukungan Doa serta motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi secepat ini.*
 - 8) *Untuk adik-adikku yang ganteng Ayosami Fodbool Club yakni Erick Assem, Alfred Yaam, Fredrik Fatem, Titus Sasior, Maikel Kamat, Yosep Momao, dan Emilianus Sasior, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, kak minta maaf apabila dalam kebersamaan kita ada kesalahan yang kak buat baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap adik-adikku semua.*
 - 9) *Untuk adik-adiku Aitim yang cantik yakni Makdalena Sakof, Carolina Sasior, Makdalena Frabuku, Yustina Fatem, dan Miska Kaitana, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, kak minta maaf apabila dalam kebersamaan kita ada kesalahan yang kak buat baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap adik-adikku semua.*
 - 10) *Adik-adikku yang baik hati, yakni Septinus Ibori, Amatus Ogoney, Eduard Orocomna, Normanus Asmorom, Apsalom Iba, Rusli Solowat, Oktovianus Ogoney, Elias Ogoney, Oktovianus Asmorom, Yosephus Fatem, Marselus Arfa, Agus Yumara, Silas Marbi, Agus Yumara, Dominggus Orocomna, Benzelina Asmorom, Martince Sedik, Marselina Iba, Yunita Yerkohek, Fianty Iba, Genofefa Fernadyanan, Paula Iray, Matelda Iba, Martinus Orocomna, terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian selama ini buat kak.*

- 11) *Untuk saudara-saudariku tercinta, Mahasiswa/i 7 (Tujuh) Suku yang tergabung pada Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Teluk Bintuni (IPMA-TB) Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, mohon maaf apabila selama kebersamaan kita ada salah dalam tutur kata maupun perbuatan saya.*
- 12) *Teman-teman Kost Bambu tercinta, yakni Werner Sasior, Manfred Siraro, Ulis Sasior, Ricardus Tanggarofa, Marthen Kaimu, dll, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan dukungan serta motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- 13) *PEMDA Kabupaten Teluk Bintuni, terima kasih atas bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada saya selama proses perkuliahan di Yogyakarta, mohon maaf apabila dalam penggunaan dana yang diberikan tidak sesuai.*
- 14) *Yang terakhir buat Bapak Kost dan Ibu kost Bambu, terima kasih atas tumpangan kamarnya buat saya selama di Yogyakarta, mohon maaf apabila selama kehadiran saya disini membuat bapak dan ibu merasa tidak nyaman.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan tentunya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik berupa pengalaman maupun teori ilmu. Sehingga penyusun sangat berterima kasih atas setiap masukan atau kritik yang disampaikan.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregoris Sahdan, S. IP.,M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P, selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan pikiran serta meluangkan waktu guna membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, selaku Dosen Penguji samping 1
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si, selaku Dosen Penguji samping II
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD” Yogyakarta.
7. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Kesbangpolinmas Provinsi DIY beserta stafnya yang telah memberikan izin penelitian.
8. Bupati Kabupaten Gunung Kidul cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu beserta stafnya yang telah memberikan izin penelitian.
9. Pemerintah Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Masyarakat yang ada di Desa Banjarejo yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun khususnya.

Yogyakarta, 9 April 2018

Penyusun

Thopilus Aisnak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Konsep Pemberdayaan	15
2. Metode Pemberdayaan	15
3. Pengorganisasian Masyarakat	16
B. RUMUSAN MASALAH	18
C. TUJUAN PENELITIAN	18
D. MANFAAT PENELITIAN	18
E. KERANGKA KONSEPTUAL	19
1. Konsep Strategi dan Pemerintah Desa	20
2. Konsep Pemberdayaan	21
3. Strategi Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat	24
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN	31
G. METODE PENELITIAN	32

1. Jenis Penelitian	32
2. Subjek Penelitian	33
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Teknik Analisis Data	35
BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	39
A. Sejarah Desa Banjarejo	39
B. Visi dan Misi Desa Banjarejo	30
1. Pokok Pelaksanaan Visi dan Misi Desa Banjarejo	40
C. Kondisi Geografis	43
D. Kondisi Demografis	45
E. Kondisi Ekonomi	46
F. Kesenian Dan Kebudayaan	48
G. Organisasi Desa Banjarejo	48
H. Organisasi Kemasyarakatan Desa Banjarejo	49
I. Sarana dan Prasarana	49
1. Sarana Keagamaan	49
2. Sarana Pendidikan	49
3. Sarana Kesehatan	50
4. Tenaga Kesehatan	51
5. Sarana Olahraga	51
J. Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	52
1. Kepala Desa	53
2. Sekretaris Desa	54
3. Pelaksana Teknis	54
4. Pelaksana Kewilayahan (Dukuh)	55

5. Tata Kerja Pemerintahan Desa Banjarejo	55
K. Profil Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Banjar Arum	56
1. Sejarah Gapoktan Banjar Arum	56
2. Visi, Misi dan Tujuan Gapoktan Banjar Arum	57
3. Keadaan Umum dan Potensi Gapoktan Banjar Arum	57
4. Kegiatan Utama Gapoktan Banjar Arum	60
5. Kelompok Tani Dalam Anggota Gapoktan Banjar Arum	60
6. Struktur Organisasi GAPOKTAN “Banjar Arum”	64
7. Fungsi Masing-Masing Pengurus Gapoktan Banjar Arum	65
BAB III. ANALISIS TENTANG STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI	74
A. HASIL PENELITIAN	74
1. Deskripsi Informan	75
2. Analisis Data Tentang Strategi Pemerintah Desa Banjarejo Dalam	
Pemberdayaan Masyarakat Tani	76
B. PEMBAHASAN	81
Menciptakan Iklim Atau Suasana Kelompok Tani	82
Memperkuat Daya Atau Kapasitas Kelompok Tani	83
Melindungi Kelompok Tani	85
BAB IV. PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
Daftar Pustaka	89
Daftar Lampiran	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Desa Banjarejo.....	27
Tabel 2.2 Demografi Desa Banjarejo.....	28
Tabel 2.3 Demografi Desa Banjarejo Berdasarkan Umur.....	28
Tabel 2.4 Demografi Desa Banjarejo Berdasarkan Pendidikan.....	29
Tabel 2.5 Demografi Desa Banjarejo Berdasaarkan Pekerjaan.....	30
Tabel 2.6 Organisasi di Desa Banjarejo.....	31
Tabel 2.7 Organisasi Kemasyarakatan Desa Banjarejo.....	48
Tabel 2.8 Sarana Ibadah di Desa Banjarejo.....	48
Tabel 2.9 Sarana Pendidikan di Desa Banjarejo.....	49
Tabel 2.10 Sarana Kesehatan di Desa Banjarejo.....	49
Tabel 2.11 Tenaga Kesehatan di Desa Banjarejo.....	50
Tabel 2.12 Sarana Olahraga di Desa Banjarejo.....	50
Tabel 2.13 Keadaan Tanah dan Fungsinya di Wilayah Kerja Gapoktan Banjar Arum.....	57
Tabel 2.14. Keadaan Luas Tanam di Wilayah Kerja Gapoktan Banjar Arum.....	58
Tabel 2.15 Populasi Ternak di Wilayah Kerja Gapoktan Banjar Arum.....	58
Tabel 2.16 Sarana dan Prasarana Kegiatan Pertanian di Wilayah Kerja Gapoktan Banjar Arum.....	58
Tabel 3.1 Deskripsi Informan Menurut Nama dan Jenis Kelamin.....	74
Tabel 3.2 Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	74
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Menurut Jenis Pekerjaan.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Analisis Milles dan Hubberman.....	35
Gambar 1.2 Struktur Organisasi di Desa Banjarejo.....	51
Gambar 1.3 Struktur Organisasi GAPOKTAN Banjar Arum Di Desa Banjarejo.....	63
Gambar 2.1 Sekretariat GAPOKTAN Banjar Arum Desa Banjarejo.....	112
Gambar 2.2 Kartu Tani.....	113
Gambar 2.3 Papan Kelompok Tani.....	114
Gambar 2.4 Papan Kelompok Pengembangan Ternak.....	115
Gambar 2.5 Foto Informan.....	116

INTISARI

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pemerintahan, merupakan akronim dari pemerintah pusat yang bisa berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan di daerah guna mewujudkan kemandirian daerah. Upaya mewujudkan kemandirian daerah mencerminkan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki. Di desa, pemberdayaan kelompok tani ini adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam hal kesejahteraan. Oleh sebab itu, perlu strategi yang tepat untuk memberdayakan masyarakat petani sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.

Penelitian tentang “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani” berlangsung di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani di Desa Banjarejo. Hal ini didasari karena banyaknya masyarakat Desa Banjarejo yang berprofesi sebagai petani dan didukung dengan keadaan geografi dan topografi dari Desa Banjarejo itu sendiri yang cocok untuk dijadikan area pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Sekretaris Desa Banjarejo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo, Penyuluh Pertanian Lapangan, Dukuh Desa Banjarejo, Mantan Pengurus Gapoktan Banjar Arum, Pengurus Gapoktan Banjar Arum, Anggota Gapoktan Banjar Arum, Pengurus Kelompok Wanita Tani, Masyarakat Petani Desa Banjarejo, dan selebihnya adalah warga Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul. Metode pemilihan subjek menggunakan teknik *purposive random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara, FGD, serta Dokumentasi.

Hasil penelitian adalah pemerintah desa hanya memiliki strategi yang berorientasi pada infrastruktur seperti pembuatan Jalan menuju Sawah/kebun dan kegiatan penyuluhan pertanian. Namun pemerintah desa belum memiliki strategi dalam penguatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan potensi alam yang tersedia di desa banjarejo untuk kesejahteraan petani. Hal ini tentu membuat pembangunan masyarakat tani melalui pengorganisasian kelompok tani di desa Banjarejo berjalan di tempat. Padahal masyarakat desa Banjarejo hampir sebagian besar bekerja sebagai petani. Ini berarti program kerja desa Pembinaan organisasi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak berjalan, padahal dana desa untuk program petani sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sudah turun kepada 21 Kelompok tani yang berada pada 21 Dusun di Desa Banjarejo, namun hal yang menyesatkan adalah sebagaimana pemerintah desa setempat tidak memiliki strategi apapun untuk melaksanakan program berdasarkan anggaran tersebut artinya anggaran yang diturunkan pemerintah Desa tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.

Kesimpulan peneliti pemerintah desa setempat tidak memiliki strategi untuk pemberdayaan masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas. Kajian peneliti faktor yang menyebabkan gagalnya proses pemberdayaan masyarakat tani selain faktor pemerintah desa yang pasif, juga ada faktor keterbatasan sumberdaya Manusia (SDM) yang kurang mendukung kemajuan organisasi GAPOKTAN Banjar Arum di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kata Kunci : *Strategi, Pemerintah Desa, Pemberdayaan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai empat bidang program kerja yang rencananya akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Banjarejo dalam acara Musrenbangdes. Empat bidang tersebut diantaranya penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam acara Musrenbangdes tersebut Camat Kecamatan Tanjungsari memberikan sambutan dan pengarahan, menegaskan untuk penggunaan Dana Desa tidak selalu hanya pembangunan fisik yang diutamakan tapi juga harus memperhatikan untuk pembangunan non-fisik untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. Sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Desa Banjarejo pada periode 2014-2019 yaitu : Menyelenggarakan pemerataan desa yang efisien, efektif dan bersih. Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu membina/ mengembangkan, membangun/ memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan tiga tujuan tersebut maka diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip "*Clean Government*" yaitu pemerintah yang bersih, oleh karena itu aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif, dan transparan serta akuntabel. Sementara salah satu misinya yang terkait dengan penelitian ini adalah: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber-sumber daya termasuk

informasi, meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan berkembangnya produktivitas sektor pertanian dan sektor sektor rill ekonomi desa.

Desa Banjarejo terletak di Daerah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul, yang memiliki luas wilayah 11.693,5.810 hektar dan terdiri dari 21 Dusun yang diantaranya adalah hasil dari pemekaran. Penduduk Desa Banjarejo berjumlah 5.865 jiwa, yakni Laki-laki sebanyak 2.884 Jiwa dan Perempuan sebanyak 2.981 Jiwa yang tersebar di 21 dusun di Desa Banjarejo. Desa Banjarejo sendiri merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari sektor pertanian. Ini terlihat dari keadaan ekonomi desa yang menunjukkan bahwa pendapatan penduduk desa Banjarejo 38.25 persen atau 1.028 Orang dari 21 kelompok tani yang tergabung dalam (GAPOKTAN) Banjar Arum. Keterlibatan anggota kelompok tani di dalam Gapoktan Banjar Arum merupakan anggota yang berasal dari setiap poktan di 21 dusun di Desa Banjarejo. Namun untuk penerimaan anggota baru dalam Gapoktan Banjar Arum merupakan pergantian anggota lama, bilamana terlihat anggota lama tidak aktif atau meninggal dunia, maka digantikan dengan anggota baru sesuai poktan masing-masing dusun di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari. Berdasarkan pengamatan penulis, perkembangan dan perjalanan kelompok tani dalam aktivitas pertanian berjalan lancar sejak tahun 1980 sampai sekarang. Namun dalam aktivitas kelompok tani tersebut hanya berjalan secara swadaya tanpa ada langkah-langkah strategi dari pemerintah desa untuk mendorong kelompok tani agar dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada lingkungan desa banjarejo antara lain seperti ketidak tersediaannya sawah atau lahan pertanian, kelengkapan alat – alat pertanian yang ada, modal usaha, kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa organisasi kelompok tani yang tergabung dalam GAPOKTAN

Banjar Arum masih sebagai organisasi formalitas di desa, sehingga pemerintah desa mempunyai peran untuk memberdayakan organisasi tersebut.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015, pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha tani di Indonesia didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang, dengan kata lain tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis. Petani kecil sangat tergantung pada golongan petani lahan luas atau pedagang untuk memperoleh asset produktif (lahan, peralatan), modal kerja dan perolehan sarana produksi. Pemberdayaan masyarakat terlebih khusus untuk kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki.

Petani dalam hal ini adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan masyarakat petani perlu dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu sasaran (petani) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu atau kelompok.

Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka

dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatukan para petani secara horizontal maupun vertikal (*Suradisastra 2006:34*). Awal pembentukan kelompok tani di Desa Banjarejo pada tahun 1980-an dengan jumlah 7 kelompok tani pada saat itu, namun dalam perjalanannya saat ini bertambah menjadi 21 kelompok tani. Dalam pengamatan penulis, perkembangan dan perjalanan kelompok tani di Desa Banjarejo belum sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat pada kelengkapan alat-alat pertanian yang ada, antara lain seperti ketidak tersediaannya sawah atau lahan pertanian untuk tes bibit, lumbung padi, alat pengering padi, alat rontok padi, kios saprodi (penyedia benih/bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan), traktor, alat penyemprot hama dan sebagainya, serta pula akses permodalan usaha tani yang masih sangat minim dan infrastruktur-infrastruktur yang kurang mendukung sehingga memerlukan perbaikan seperti jalan kebun, jaringan irigasi, alat transportasi, dan alat komunikasi, serta eksistensi kelembagaan petani yang sebagian besar masih sebatas formalitas. Adapun maksud dari eksistensi kelembagaan yang masih bersifat formalitas disini adalah keaktifkan pertemuan-pertemuan dari kelompok tani yang ada. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar bisa membantu pemerintah desa untuk menjadi lebih baik lagi dalam merencanakan serta mengevaluasi setiap program kerja yang ada dan menjadikan Desa Banjarejo maju dalam pembangunan desa melalui hasil-hasil sektor pertanian sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pemerintah sendiri dan tentunya terlebih untuk masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Kidul masih 28,34 persen. Sekitar 42,6

persen lebih tinggi urutan kedua dari Kabupaten Kulonprogo yang mencapai 20,30 persen. Dari jumlah penduduk tersebut berada di desa dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Kemiskinan di desa merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pada saat ini kualitas sumberdaya manusia yang bekerja pada sektor pertanian masih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dilihat dari tingkat pendidikan mereka sangat rendah dan jarang sekali yang memiliki pengetahuan dan ahli tentang ilmu pertanian yang mencukupi, dan mereka terjun di sektor pertanian pun karena tuntunan dan pengalaman yang didapatkan dari orangtua mereka yang sudah turun temurun. Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani, baik yang berhubungan langsung dengan produksi, pemasaran hasil-hasil pertanian, dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang sering dihadapi petani dari segi produksi biasanya berupa kegagalan panen dan dari tingkat harga biasanya berupa harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Oleh karena itu petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Masalah-masalah mendasar lain yang ditemukan di lapangan ini juga sependapat dengan Zakaria (2008: 3) ialah sulitnya akses terhadap sumber kapital, informasi, dan teknologi. Selain itu organisasi petani yang masih diharapkan sebagai komponen pokok dalam pembangunan pertanian, namun kondisinya saat ini belum memuaskan (Suhaeti dkk, 2014: 158). Oleh karena itu organisasi petani dapat dinilai masih lemah. Kondisi yang sedemikian itu menyebabkan masyarakat petani menjadi miskin, tidak berdaya, dan tertinggal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008, tentang pedoman penyaluran bantuan kepada petani. Dalam rangka memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penyaluran bantuan sosial kepada

petani Tahun Anggaran 2008, diperlukan prosedur penyaluran dana bantuan sosial kepada petani sasaran yang diatur sebagai berikut:

1. Kelompok Sasaran:
 - a. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, antara lain kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Pedesaan;
 - b. Petani sasaran sebagai penerima dana bantuan sosial adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat atau kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk atas usul tim teknis kabupaten/kota, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada KPPN setempat.

Pencanangan program pertanian terpadu pada tahun 2008 yang disetujui oleh Dinas Pertanian Gunungkidul diharapkan untuk direalisasikan oleh masyarakat petani di wilayah Kabupaten Gunungkidul terutama Kecamatan Tanjungsari yang tepatnya di Desa Banjarejo untuk menjalankan program pekarangan terpadu. Program pekarangan terpadu untuk meningkatkan peran "Desa Mandiri" dalam membangun *Agricultural Community Development* yang berbasis pada partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan dari program pertanian terpadu yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa pada khususnya dan Pertanian Indonesia pada umumnya.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani Sektor pertanian

mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bio-energi, penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 telah menetapkan visi, yaitu “Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan, Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kelompok tani.

Pembangunan atau pengembangan masyarakat (community development-CD) merupakan sebuah metode pekerjaan sosial yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Di dalam pembangunan masyarakat terjadi interaksi aktif antara pekerjaan sosial dan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program peningkatan kesejahteraan sosial.

Pembangunan masyarakat umumnya dimaknai sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruh terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Secara khusus pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan sosial kelas, suku, agama, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan. Pemberdayaan masyarakat memiliki fokus

terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Pembangunan masyarakat sering diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan kesejahteraan sosial yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

Pemberdayaan (masyarakat desa) dengan beberapa cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks penempatan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (*agen atau partisipan bertindak*) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (*kewajiban*) secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. *Kedua*, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta

dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis, Edi Suharto dalam Sutoro Eko (2005:145-150).

Peranan masyarakat dalam pembangunan sangatlah mutlak diperlukan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat dapat berperan serta secara aktif mulai dalam kegiatan pembangunan pedesaan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya, dan hal ini tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerahnya.

Pendekatan pembangunan dengan berbasis pada kekuatan masyarakat adalah pendekatan yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga menjadi sebuah kewajiban jika sampai saat ini masih dalam proses diskursus. Para praktisi yang menjadi pelaksana pembangunan dan para ahli yang melakukan kajian sedang melakukan berbagai penyesuaian agar mekanisme pembangunan yang semula berbasiskan pada pendekatan pertumbuhan dapat mencerminkan bentuk kegiatan

pembangunan yang berbasiskan pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)).

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama.

Dalam Kamus Inggris Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007).

Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai ‘kearifan/ kebijaksanaan’. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan harmonis. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Pada akhirnya kearifan lokal dijadikan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang meliputi seluruh unsur kehidupan: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka.

Masyarakat tanpa konflik yang majemuk jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat tanpa konflik yang majemuk, warga bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam mewujudkan tercapainya masyarakat tanpa konflik yang majemuk, yaitu: 1) terpeliharanya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; 2) terpelihara dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keselamatan; 3) tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; 4) terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh toleransi dan tenggang rasa; 5) terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; dan 6) terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia di era globalisasi, paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi eksese-eksese negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa dengan masuknya budaya-budaya luar harus mengupayakan adanya filterisasi budaya. Oleh karena itu, multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda dan lebih merupakan pembedaan yang simetris (*symmetrical differentiated citizenship*) dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Hal inilah yang mestinya didorong oleh kebijakan Otonomi Daerah dalam rangka mengeliminir munculnya loyalitas sempit atas dasar agama maupun ikatan kesukuan belaka. Selain itu, melalui pluralitas identitas, maka perjuangan kepentingan masyarakat lokal tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan sektarian yang bisa mengancam harmoni

lokal itu sendiri. Implementasi Otonomi Daerah juga meniscayakan pemberian ruang politik dan aspirasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Prinsip penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman nilai-nilai merupakan pembiakan dari prinsip demokrasi yang tidak saja mendorong terciptanya partisipasi dari dan pemberdayaan bagi semua golongan masyarakat. Akan tetapi pembiakan dari prinsip demokrasi ini juga akan terwujud dalam bentuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya serta ide atau pendapat yang saling berbeda maupun mengakui dan menghargai prinsip Otonomi Daerah yang luas dan nyata yaitu keberadaan hak-hak asli daerah dan hak-hak rakyat di daerah.

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia di tempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.

Pemberdayaan komunitas tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada beberapa kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat di wujudkan dengan menerapkan

prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut: (1) Belajar dari masyarakat, (2) Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai pelaku, (3) Saling belajar, Saling berbagi pengalaman.

Pada prinsipnya pemberdayaan bukan merupakan suatu program atau kegiatan yang berdiri sendiri. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merubah lebih dari satu aspek pada diri dan kehidupan seseorang atau sekelompok orang agar mampu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membuat kehidupannya lebih baik dan sejahtera. Upaya pemerdayaan masyarakat merupakan jalan yang masih panjang dan masih penuh tantangan. Model pembangunan ekonomi yang sentralistik dan sangat kapitalistik telah melembagakan sangat kuat baik secara ekonomi, politik maupun budaya, sehingga tidak mudah untuk menjebolnya. Hanya dengan komitmen yang kuat dan berpihak yang tulus, serta upaya yang sungguh-sungguh, pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.

Pemberdayaan masyarakat agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi rakyat, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan lokal atas dasar kebutuhan setempat. Penguatan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan, harus dorong seluas-luasnya melalui program-program pendampingan menuju suatu kemandirian mereka. Disamping itu pula perlu pengembangan organisasi, ekonomi jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan usaha pemberdayaan masyarakat yang ada dalam masyarakat yang demikian itu, diharapkan membebaskan mereka dari berbagai permasalahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan di bidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah melalui kemudahan dalam pemilikan dan penguasaan faktor-faktor produksi, kemudahan dalam distribusi dan jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang memadai sehingga masyarakat memiliki potensi tawar yang sama dalam kegiatan ekonomi. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan dan penegakan nilai-nilai, ide-ide, gagasan, tata kelakuan dan norma-norma yang disepakati bersama (*social capital*) yang berdasarkan atas moral yang dilembagakan, dan mengatur masyarakat dalam kehidupan sosial budaya serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas, Moeljarto dalam Sumarjono (2005:16-17).

2. Metode Pemberdayaan

Dari pengalaman empiris dan historis, masyarakat yang kehilangan daya tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, mereka perlu diberdayakan, karena mereka dalam keadaan tereksploitasi dan terpinggirkan. Keadaan mereka masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam: keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial, ketrampilan, sikap kritis, wawasan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidupnya. Hal ini sebagai akibat sempitnya ruang gerak yang diberikan pemerintah terhadap rakyat kecil dalam melakukan pembangunan.

Untuk membangun keberdayaan masyarakat yang lemah, (Kartasmita dalam Priyono) dikemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan

melalui 3 (tiga) cara yaitu: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi dasar untuk menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang adalah bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi. (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, maka perlu diterapkan langkah nyata dengan menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan, listrik) maupun sosial (pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah. (3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah atau miskin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat, Priyono dalam Sumarjono (2005:18-19).

3. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat sebagai suatu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pendamping untuk membantu kelompok masyarakat agar dapat membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan mobilisasi sumberdaya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut yang pada akhirnya masyarakat dapat mencapai kemandirian.

Proses pemberdayaan melalui pengorganisasian masyarakat itu secara umum merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun masyarakat untuk percaya diri menyelesaikan dan mengatasi permasalahan hidupnya.

Serupa dengan proses yang dikembangkan Tilakaratna, Mayo dalam Adi (2001:68-70), mencatat bahwa proses pemberdayaan biasanya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menjalin kontak dengan individu, kelompok ataupun organisasi;
2. Mengembangkan profil komunitas, menilai kebutuhan dan sumberdaya masyarakat;
3. Mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang;
4. Memfasilitasi kelompok-kelompok sasaran;
5. Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antar kelompok ataupun organisasi;
6. Melakukan kolaborasi dan negosiasi dengan berbagai lembaga dan profesi;
7. Menghubungkan isu yang ada secara efektif dengan pembuatan keputusan dan implementasinya, termasuk menjalin relasi dengan politisi di tingkat lokal;
8. Berkomunikasi dengan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan berbagai individu, kelompok dan organisasi;
9. Bekerjasama dengan individu dalam komunitas, termasuk melakukan konsultasi bilamana perlu;
10. Mengelola sumberdaya yang ada, termasuk waktu dan dana;
11. Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumberdaya yang dibutuhkan;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan program atau kegiatan, terutama pemanfaatan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien;
13. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa.

Berbagai uraian tentang proses yang perlu dilaksanakan untuk melakukan pemberdayaan, terdapat konsisten umum, kegiatan tersebut harus dimulai dengan pemahaman terhadap permasalahan yang dilakukan oleh pemberdayaan atau pengorganisasian masyarakat bersama kelompok masyarakat yang akan diberdayakan.

Selanjutnya merumuskan rencana secara bersama-sama untuk mengembangkan sumber-sumber pendukung sesuai dengan kemampuan masing-masing, melaksanakan kegiatan dan terakhir adalah proses pemandirian ini dimaksudkan agar kelompok masyarakat yang diberdayakan mampu meneruskan dan jika memungkinkan mengembangkan sendiri upaya-upaya yang pernah dilakukan bersama.

Penyiapan masyarakat untuk membentuk kelompok dapat dilakukan secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan reformatif, seperti kelompok petani, peternak, pemuda, kesejahteraan lingkungan, perkoperasian dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Petani melalui GAPOKTAN “Banjar Arum” di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari?
2. Apa kendala yang di hadapi pemerintah desa dalam melaksanakan strateginya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani melalui GAPOKTAN Banjar Arum di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan memperkaya khasana keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD”, dan juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Anonim, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media.
- Anonim, 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Anonim, 2014. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Anonim, 2014. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Anonim, 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan UU Desa
- Anonim, Pemberdayaan Petani. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Anonim, Peningkatan Kesejahteraan Petani.* Bogor : Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.
- Anonim, 2007. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media.
- Anonim. (2008). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008.* Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Anonim. (2013). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013.* Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Aginia, Revikasari. (2010). *Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.* Surakarta : Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Adimihardja, ed. (1999). *Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi: Pendayagunaan Sistem Pengetahuan Lokal dalam Pembangunan,* Bandung, Humaniora Utama Press.
- Budiwati, Yulia (2011), Signifikansi Masyarakat Multikultural Bagi Pengembangan Demokrasi, Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, FISIP – UT, (diakses pada tanggal 7 April 2018).
- Daniel, Moehar dkk. (2008). *Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

- Dadang Respati Puguh (2009) Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal diakses dari <http://www.babinrohisnakertrans.org/artikel-islam/membangunmasyarakat-madani-berbasis-kearifanlokal-oleh-dadang-respati-puguh>, (diakses pada tanggal 7 April 2018).
- Dadang sudiadi, (2009) Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang Majemuk: Suatu Pandangan Pentingnya Pendekatan Multikultur Dalam Pendidikan di Indonesia, diakses dari <http://beritasore.com/2009/04/15/membangun-masyarakatharmonis-dengan-semangat-multikulturalisme/>, (diakses pada tanggal 7 April 2018).
- Deptan, Jakarta. Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025. Dalam: <http://www.litbang.deptan.go.id/rppk>, (diakases 20 Maret 2018).
- Eko, Sutoro. (2005). Manifesto Pembaharuan Desa. Yogyakarta : APMD Press
- Eko, Sutoro. (2005). *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta : APMD Press.
- Eko,Sutoro 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Fauzi, Ikka Kartika A. (2011). *Mengelola Pelatihan Partisipatif*. Bandung :Alfabeta. *Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Surakarta : Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta : Andi Offset.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanum, Farida, 2005, Multikulturalisme dan Pendidikan, diakses<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/farida-hanum-msidr/multikulturalisme-dan-pendidikan.pdf>, (diakses pada tanggal 7 April 2018).
- Haryanto dkk (2009). Sistem Sosial Budaya Indonesia, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Ife, J.W, 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Jamal, H, 2008. Mengubah Orientasi Penyuluhan Pertanian. Balitbangda Provinsi Jambi. Jambi Ekspres Online. Diakses tanggal 18 Februari 2008.

- J. Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Juliantara, 2005, *Pembaruan Desa Bertumbuh Pada Yang Terbawah*. Jakarta, Gunung agung.
- Kamil, Mustofa. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung : Alfabeta.
- Koentjaraningrat (1990) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Kutut Suwondo, 2005, Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyatdan Negara di Pedesaan Jawa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Percik.
- Mariani. (2011). *Penguatan Manajemen Kelompok Tani Di Kota Banjarbaru*. Banjarbaru : Fakultas Pertanian UNLAM.
- Moedzakir, M. Djauzi. (2010). *Desain Dan Model Penelitian Kualitatif*. Malang : FIP Malang.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir M., Darwin, 2007, *Peran CSR dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)”, Modul pelatihan dalam Pelatihan Corporate Sosial Responsibility kerjasama antara Magister Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada (MSK-UGM) dan PT Pupuk Kaltim tanggal 16-20 Juli 2007*.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis.
- Pujiharto. (2010). *Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian Di Pedesaan*. Purwokerto : Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Pranarka dan Moeljarto, Mangatas. 1996,*Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- PPK-LIPI. 2004. *Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga*. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2004. Jakarta: Puslit kependudukan _LIPI
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Ibda P3M STAIN Purwokerto* Vol 5 No.1 , 27-38.
- Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian dalam Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Bogor. *Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian*. Volume 4 No 4 Desember 2006.

- Saragih, Bungaran, 2002. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad ke 21. <http://www.202.159.18.43/jsi.htm> (online). 10 Oktober 2002.
- Saptana, T; Pranadji; Syahyuti dan Roosganda, E.M., 2003. Transformasi Kelembagaan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian. PSE. Bogor.
- Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati . Jurnal Filsafat Jilid 37, Nomor 2 , 111.
- Siregar, Parluhutan (2008), Revitalisasi Kerarifan Lokal Batak Toba dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. VII No. 27 Juli-September 2008.
- Sitorus, Henry (1999). Rekonstruksi Integrasi Sosial Melalui Manajemen SARA, Makalah disajikan dalam Kongres ISI III, Malang, 24 – 26 Pebruari 1999.
- Suparlan, Parsudi. 2002, Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhaeti, Rita N. (2014). *Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Suharto, Edi. 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama.
- Sukino. (2014). *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suryana, A. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Susanti, Retno L.R. (2011) Membangun pendidikan karakter di sekolah Melalui Kearifan Lokal, makalah disampaikan pada Persidangan Dwitahunan FSUA-PPIK USM pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2011 di Fakultas Sastra Unand, Padang.
- Swastika, dkk. (2011). *Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.

Totok Mardikanto. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Zakaria, Wan Abbas. (2008). *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani*. Bandar Lampung : Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Zuriah, Nurul. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sumber Internet:

<http://banjarejo-tanjungsari.desa.id/index.php/first/artikel/109> (diakses 14 Oktober 2017).

<http://banjarejo-tanjungsari.desa.id/index.php/first/artikel/8> (diakses 05 November 2017)

[http://google.com/Konsep Strategi](http://google.com/Konsep%20Strategi) (diakses 15 Oktober 2017).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41505/Chapter%20II.pdf;jsessionid=BEDDA0D43AB6BA04A78C4A6EC63D3F5B?sequence=4> (diakses 01 November 2017)

[http://wikipedia.com/Konsep Pemberdayaan](http://wikipedia.com/Konsep%20Pemberdayaan) (diakses 15 Oktober 2017).

<https://eproposal.pertanian.go.id/guest2/listPoktan.php?ig=59136&kdpr=34&kdkab=03&kdkec=041> (diakses 14 Oktober 2017).

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/Brs/view/id/481> (diakses 04 November 2017)

<http://binadesa.org/peran-desa-dalam-perlindungan-dan-pemberdayaan-petaninelayan/> (diakses 09 Februari 2018)

<https://syahyuti.wordpress.com/2008/03/31/strategi-dan-tantangan-dalam-pengembangan-gabungan-kelompok-tani-gapoktan-sebagai-kelembagaan-ekonomi-di-pedesaan/> (diakses 20 Maret 2018).

www.slideshare.net/bambangpoenya/tugas-pemberdayaan-masyarakat (diakses pada tanggal 7 April 2018)

Artikel Michail Porter berjudul “*What is Strategi?*” yang dimuat dalam *Business Review* November-Desember 1996.

Akhmad SatoriD:\Prosiding B5\6) Prosiding_Akhmad Satori (16.h).docx - _ftn1, (2012). Merajut Masyarakat Multikultural Dalam Bingkai Otonomi Daerah, diakses dari<http://akhmadsatori.blogspot.com/2012/04/merajut-masyarakat-multikulturaldalam.html>, (diakses pada tanggal 7 April 2018).